ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN (BOP) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

Yogi Dwi Putra

07011281823056

Konsentrasi : Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

JULI 2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN (BOP) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Yogi Dwi Putra

07011281823056

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Sofyan Effendi, S. IP., M.SI NIP. 197705122003121003	----------	25-7-2022 ----------
Pembimbing II		
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si NIP. 196911191998032001	----------	22 Juli 2022 ----------

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN (BOP) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

Skripsi

Oleh :
YOGI DWI PUTRA
07011281823056

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal .....

Pembimbing :

Tanda Tangan

1. Sofyan Effendi, S. IP., M. Si
   NIP. 196911101994011001
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
   NIP. 196911191998032001

Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
   NIP. 196911101994011001
2. Raniasa Putra, S. IP., M. Si
   NIP. 197805122002121003

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yogi Dwi Putra
NIM	: 07011281823056
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tanjung Raja, 11 Maret 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Inderalaya, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Yogi Dwi Putra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Kejujuran adalah langkah pertama menuju kesuksesan"

(Mary Kay Ash)

"Jadilah pribadi yang bertanggungjawab karena itu akan menggambarkan seberapa berkualitasnya dirimu"

(Jusuf Kalla)

Atas berkah dan ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kedua Orang Tua saya, Emak
2. Kakakku Oskar Setiawan
3. Para sahabatku Adhigana Squad
4. Seluruh Dosen yang membimbing
5. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan teori pengelolaan dari Rahardjo Adisasmita yang mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 belum maksimal karena pada dimensi perencanaan dengan indikator pembahasan perencanaan anggaran BOP KUA belum berjalan sesuai dengan prosedur petunjuk teknis yaitu Keptusuan Direktur Jendral Bimingan Masyarakat Islam Nomor 340 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BOP KUA Kecamatan, pada dimensi pelaksanaan dengan indikator pelaksanaan penggunaan anggaran belum dapat dikatakan akuntabel karena adanya kesenjangan antara laporan pertanggungjawaban dengan keadaan dilapangan, serta dalam dimensi pengawasan belum maksmimal karena tidak adanya pengawasan khusus yang mengawasi penggolaan anggaran BOP KUA kecamatan karena sering terjadi ketidakdisiplinan pengelola BOP KUA dalam mengelola Anggaran BOP KUA, penelitian ini merekomendasikan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dan Kua Kecamatan Sungai Pinang untuk lebih patuh dan mengikuti petunjuk teknis yang ada serta dalam pengawasan terhadap anggaran biaya operasional kantor urusan agama ini hendaknya memberikan pengawasan khusus seperti rutin dalam pemeriksaan LPJ dan Monitoring Evaluasi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap KUA yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu dengan tidak mencairkan anggaran pada periode tersebut sehingga dapat tercapai pengelolaan anggaran BOP yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengelolaan, Kantor Urusan Agama, Bantuan Operasional

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Emanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to find out how to manage the Office Operational Budget (BOP) at the Office of Religious Affairs, Sungai Pinang District, Ogan Ilir Regency in 2020. This study uses the management theory of Rahardjo Adisasmita which has three dimensions, namely the dimensions of planning, implementation, and supervision. This research was conducted at the KUA, Sungai Pinang District, Ogan Ilir Regency. This type of research is descriptive with a qualitative method approach. The type of data used is primary data and secondary data, with data collection techniques from interviews, observations and documentation. Based on the results of the study, the Management of the Office Operational Budget (BOP) at the Office of Religious Affairs, Sungai Pinang District, Ogan Ilir Regency in 2020 was not maximized because the planning dimensions with indicators for discussing the budget planning BOP KUA had not run in accordance with the technical guidance procedures, namely the Decree of the Director General of Community Guidance, Islam Number 340 concerning the Implementation Guidelines for the Sub-district KUA BOP, in the implementation dimension with indicators of the implementation of the use of the budget it cannot be said to be accountable because of the gap between the accountability report and the situation in the field, and in the dimension of supervision it is not maximized because there is no special supervision that oversees the management of the sub-district BOP KUA budget, because there is often indiscipline between BOP KUA managers in managing the BOP KUA budget, this study recommends the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency and Kua, Sungai Pinang District to be more obedient and follow Following the existing technical guidelines and in supervising the budget for the operational costs of this religious affairs office, it should provide special supervision such as routine inspections of LPJ and Evaluation Monitoring as well as providing strict sanctions against KUA that are not in accordance with the technical instructions, namely by not disbursing the budget in that period so that effective and accountable BOP budget management can be achieved.

Keywords: Management, Office of Religious Affairs, Operational Assistance

Advisor I

Sofyan Effendi, S.IP., M. Si

NIP. 197705122003121003

Advisor II

Emanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2022

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social Science and Political Science

Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji kehadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020". Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamahnanti.

Skripsi ini di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta **Bapak Surdan dan Ibu Agustinar**, yang tak pernah hentinya mendoakan serta memberi dukungan penuh cinta untuk anaknya selama ini, Ridho mereka adalah Ridho Allah Swt.
2. **Prof. Dr. Alfitri M.Si**. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. **Bapak Sofyan Effendi, S.IP., MSi** sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pembimbing I yang telah dengan sabar dan pengertian, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
5. **Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan pengertian, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. **Bapak M. Kholil Azmi, S, Ag** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
7. **Bapak H. Jhon Hery, M, Ag** selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang
8. **Ibu Fenny Argarini** Selaku Bendahara Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
9. **Seluruh pegawai dan staff di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir** yang sudah menerima dan memberikan ilmu-ilmu serta pelajaran yang berkesan

10. **Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, didikan, bimbingan, dan arahan.
11. **Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah membantu selama menjalankan proses administrasi akademik
12. **Keluarga besar saya, kakak ayuk dan adik** saya yang selalu membersamai danmembantu dalam segala bidang kehidupan
13. Sahabat seperjuangan Adhigana Squad (**Sania Fatricia, Sonia Ferdika, Liza Fitria Syar Sella, Ummi Mardhotillah**) terimakasih sudah menjadi orang-orang yang tulus dan bersedia berjuang bersama dari awal bangku perkuliahan
14. **Teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018** kampus Indralaya yang telah membantu dan membersamai dari semester awal hingga akhir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Indralaya, Juli 2022

Yogi Dwi Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama KAB Ogan Ilir 5
Gambar 2. Kondisi Tampak Luar Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang 10
Gambar 3. Kondisi Ruangan Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang 10
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
BAB II **13**
TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Landasan Teori 13
1. Keuangan Negara Dalam Administrasi Publik 13
2. Pengelolaan 14
3. Anggaran 15
4. Pengelolaan Anggaran 18
5. Teori Yang Digunakan 21

6. Biaya Operasional Perkantoran 24
B. Kerangka Teori 32
1. Perencanaan 33
2. Pelaksanaan 33
3. Pengawasan 33
C. Kerangka Pemikiran 34
D. Penelitian Terdahulu 35
BAB III 43
METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Definisi Konsep 44
1. Pengelolaan 44
2. Anggaran 44
3. Pengelolaan Anggaran 44
4. Biaya Operasional Perkantoran 44
C. Fokus Penelitian 44
D. Jenis dan Sumber Data 45
1. Jenis data 45
2. Sumber Data 46
E. Informan Penelitian 46
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Teknik Analisis Data 48
1. Reduksi Data (*Data Reduction*) 48
2. Penyajian Data (*Data Display*) 49
3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) 49
H. Sistematika Penulisan 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
B. Hasil dan Pembahasan 58
BAB V PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Table 1. Laporan Realisasi Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) Kantor Urusan Agama Tahun Anggaran 2020 Kementerian Agama KAB. Ogan Ilir..... 8

Table 2. Laporam Pertanggung Jawaban Dana Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2020..... 9

Table 3. Penelitian yang Terdahulu..... 36

Table 4. Indikator pengukuran pengelolaan anggaran Menurut Rahardjo Adisasmita 44

Table 5. Personil KUA 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama KAB Ogan Ilir..... 5

Gambar 2. Kondisi Tampak Luar Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang..... 10

Gambar 3. Kondisi Ruangan Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang 10

Gambar 4. Kerangka Pemikiran 34

Gambar 5. Struktur Organisasi KUA Kec. Sungai Pinang 54

Gambar 6. Skema Pencairan Dana menurut Kepdirjen Bimas Islam 61

Gambar 7. Format Pembuatan Rencana Pengunaan BOP KUA Kecamatan Pertahun64

Gambar 8. RAB Bulanan 64

Gambar 9. Alur Pembayaran BOP KUA Metode Pembayaran Uang Persediaan 100% dari Pengajuan melalui Rekening Pengelola BOP KUA 67

Gambar 10. Alur Pembayaran BOP KUA Metode Pembayaran Uan Pgersediaan kurang 100% dari Pengajuan melalui Rekening Pengelola BOP KUA 70

Gambar 11. Alur Pembayaran BOP KUA Metode Pembayaran Langsung

Gambar 12. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Bulan Oktober 2020 72

Gambar 13. Keadaan di KUA Kec. Sungai Pinang 73

Gambar 14. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 340 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran Kantor Urusan Agama Kecamatan 82

Gambar 15. Dokumentasi Wawancara dengan Bendahara Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 85

Gambar 16. Format Buku Kas Umum BOP KUA 86

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat Islam
BKU	: Buku Kas Umum
BOP	: Bantuan Operasional Prosedur
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP `	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Covid-19	: *Corona Virus Disease 19*
FISIP	: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Juklak	: Petunjuk Pelaksana
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kanwil	: Kantor Wilayah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
Kasi	: Kepala Seksi
KEMENAG	: Kementerian Agama
KMA	: Keputusan Menteri Agama
KKA	: Kuliah Kerja Administrasi
KUA	: Kantor Urusan Agama
UP	: Uang Muka
LS	: Pembacaran Langsung
MDGs	: *Millenium Development Goals*
NICA	: Netherlands Indies Civiele Administration
OI	: Ogan Ilir
OKU	: Ogan Komering Ulu
PAKIS	: Pendidikan Agama Islam
PENMAD	:Pendidikan Madrasah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PHU	: Penyelenggara Haji dan Umroh
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SK	: Surat Keputusan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TU	: Tata Usaha
UP	: Uang Muka
UU	: Undang-undang
SDGs	: *Sustainable Development Goals*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi..... 96
Lampiran 2. SK Skripsi 97
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi..... 98
lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal 101
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi 103
Lampiran 6.Surat Izin Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....105
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang.....106
Lampiran 8. Surat Balasan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan global atau disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanji kanmasyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means ofImplementation*) (Alfa, 2021).

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 319 Indikator (Metadata September 2017) yang tercakup menjadi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola secara terintegrasi, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. .Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjuta
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin ke-16 yang mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level. Dalam membangun dan menciptakan suatu lembaga yang efektif dan akuntabel, SDGs mempunyai target yaitu Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level guna mengurangi terjadinya korupsi dan suap dalam segala bentuk apapun (https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/).

Di era sekarang, baik itu pemerintahan dalam lingkup kecil ataupun luas sekalipun dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam hal aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program pemerintah (https://djpb.kemenkeu.go.id/). Hal tersebut biasanya menyangkut tentang anggaran yang digunakan dalam menunjang kebutuhan setiap unit instansi.

Anggaran memegang peran penting dalam suatu organisasi dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya pengelolaan yang bersifat transparansi dan akuntabilitas sehingga menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance* (Djamhuri, 2013).

Anggaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dirancang untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dalam satu periode, tetapi anggaran bukan merupakan suatu prediksi melainkan suatu proyeksi dan estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Perlunya suatu anggaran didalam sebuah negara untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja dalam satu periode selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi dalam sistem negara tersebut. Anggaran dituntut dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Anggaran yang didapat nantinya akan dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan,hal ini dilansir dari jurnal yang berjudul “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komitmen, Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punisment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja” oleh (Maryam, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa anggaran yang baik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepaturan. Salah satu unsur diatas yang paling dianggap penting dalam pelaksanaan anggaran adalah efektif. Penerapan anggaran berbasis

kinerja yang mengenal adanya perlakuan terhadap surplus dan defisit, yang artinya pelaksanaan anggaran telah dicanangkan bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang ditentukan tidak tercapai sesuai realitas melampaui maka anggaran tersebut mengalami surplus.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Juga Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) bahwa daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejak diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efektif dan efisien. Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil pada jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah.

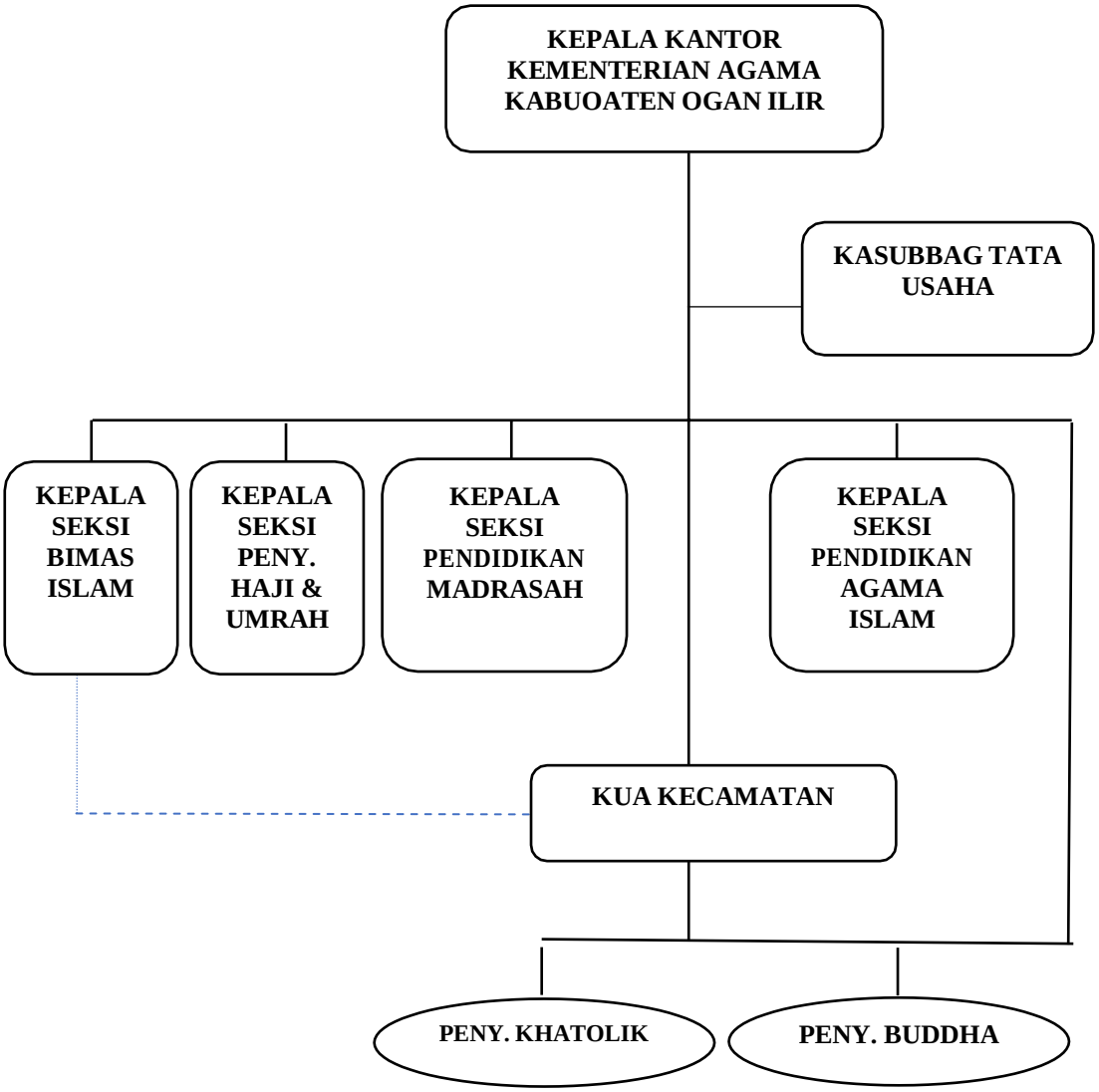

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama KAB Ogan Ilir
Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag OI, Tahun 2021

Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Ogan Ilir tersebar menjadi 16 KUA, yaitu di Kecamatan Indralaya, Pemulutan, Tanjung Batu, Muara Kuang, Tanjung Raja, Rantau Alai, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Payaraman, Lubuk Keliat, Sungai Pinang, Rantau Panjang, Pemulutan Selatan, Kandis, Rambang Kuang dan Pemulutan Barat. Kantor Urusan Agama tersebut merupakan jajaran instansi terkecil di Kementerian Agama dan dalam pengelolaanya dan pelaksanaannya berada dibawah naungan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur pelaksana yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan wadah struktur itu, Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu intansi penyelenggara pelayanan publik hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pada ayat 6 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama mempunyai anggaran yang biasa disebut dengan Biaya Operasional Perkantoran (BOP) yang digunakan dalam menunjang kegiatan pelayanan KUA guna memenuhi kebutuhan untuk menciptakan pelayanan KUA yang baik. Biaya operasional KUA merupakan alokasi anggaran yang dipergunakan untuk menunjang dan mendukung serta aktifitas layanan KUA dalam satu tahun anggaran berdasarkan usulan kebutuhan KUA.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 340 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenlolaan Biaya Operasional Perkantoran Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam Petunjuk Teknis tersebut terdiri dari rangkaian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan BOP KUA. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan BOP KUA.

Pada pengelolaan BOP KUA, format laporan rencana penggunaan BOP KUA yang disediakan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus dibuat dan dikumpulkan oleh setiap KUA sebagai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan, mulai dari pemilihan penyedia yang sesuai, pembelian barang/jasa, sampai pengawasan agar berjalan sesuai dengan rancangan dan kesepakatan awal. Masalah utama yang terdapat dalam pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran di Kecamatan Sungai Pinang adalah pihak KUA sungai pinang tidak membuat dan mengumpulkan perencanaan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) setahun, dimana hal tersebut sudah tertera didalam petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) pengelolaan BOP dana KUA.

Berdasarkan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam pengelolaan BOP KUA harus menyusun dan membuat jadwal penggunaan BOP KUA untuk satu tahun anggaran (meliputi jenis kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan jenis belanja) dan disampaikan pada pihak PPK pada bulan pertama tahun anggaran berkenan. Selanjutnya, pengelola BOP KUA membuat RAB bulanan yang paling sedikit membuat jenis belanja, nama dan NPWP toko/rekanan dan jumlah dan jumlah dana yang dibutukan dan pengelola BOP KUA Bersama dengan PPK dan bendahara membuat kesepakan terkait perihal waktu pengajuan RAB bulanan, pembayaran uang muka, pertanggungjawaban dan pelaporan setiap bulannya. Pada kondisi ini menyebabkan PPK BIMAS kesulitan dalam mencairkan dana BOP KUA karena persyaratan awal mereka untuk mengumpulkan RAB tahunan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan jika tidak dicairkan segera akan menjadi permasalahan dalam target realisasi anggaran.

Jumlah anggaran operasional yang diberikan ke setiap Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing KUA. Masing-masing KUA diberikan Pagu atau bisa dibilang batas pengeluaran tertinggi

yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Batasan atau limit dari pengeluaran yang tersedia ini dapat digunakan untuk pengadaan barang ataupun jasa.

Tabel 1. Laporan Realisasi Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) Kantor Urusan Agama Tahun Anggaran 2020 Kementerian Agama KAB. Ogan Ilir

NO	Kantor Urusan Agama	Pagu BOP KUA	Realisasi BOP Tahun 2020	Sisa Dana	%
1.	Indralaya	35.475.000	34.446.000	1.029.000	97%
2.	Pemulutan	39.075.000	38.792.739	282.261	99%
3.	Tanjung Raja	37.275.000	36.805.000	470.000	99%
4.	Muara Kuang	39.075.000	37.407.500	1.667.500	96%
5.	Tanjung Raja	37.475.000	37.153.350	321.650	99%
6.	Rantau Alai	40.275.000	35.400.500	4.874.500	88%
7.	Indralaya Utara	38.475.000	37.676.500	798.500	98%
8.	Indralaya Selatan	28.875.000	28.589.000	286.000	99%
9.	Payaraman	32.475.000	31.593.870	881. 130	97%
10.	Lubuk Keliat	28.975.000	28.975.000	-	100 %
11.	Sungai Pinang	27.175.000	27.175.000	-	100 %
12.	Rantau Panjang	28.975.000	28.429.000	546.000	98%
13.	Pemulutan Selatan	28.775.000	28.775.000	-	100 %
14.	Kandis	29.475.000	26.775.000	2.700.000	91%
15.	Rambang Kuang	28.975.000	28.975.000	-	100 %
16.	Pemulutan Barat	27.175.000	27.035.000	140.000	99%
Jumlah		528000.000	514.003.459	13.996.541	97%

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag OI, Tahun 2021

Tabel 1 menjelaskan laporan realisasi Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) Kantor Urusan Agama tahun anggaran 2020 kementerian agama Kab. Ogan Ilir Kecamatan Rantau Alai memperoleh Pagu tertinggi yaitu Rp. 40,275,000 namun yang terealisasi terendah hanya sekitar Rp. 35,400,500 dengan presentase realisasi 88%. Sedangkan KUA Sungai Pinang memperoleh Pagu terendah yaitu Rp. 27,175,000 dengan presentase realisasi anggaran 100%. Pagu yang diberikan berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing KUA.

Tabel 2. Laporam Pertanggung Jawaban Dana Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2020

NO	Uraian Dana	Total Dana Operasional Keseluruhan Januari-Desember 2020
1.	Dana operasional	Rp. 8.575.000
2.	Belanja barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (ATK)	Rp. 9.000.000
3.	Belanja Pemeliharaan alat dan mesin	Rp. 1.000.000
4.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 5.600.000
5.	Belanja alat pelindung diri	Rp. 2.400.000
6.	Pembuatan wastafel untuk penanganan covid-19	Rp. 600.000
Jumlah Total		Rp. 27.175.000

Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag OI, Tahun 2021

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran belanja laporan operasional yang terdiri dari belanja keperluan kantor, belanja alat perlindungan diri dari covid-19, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, pembuatan washtafel untuk penanganan covid-19 dan belanja perjalanan dinas dalam kota, dimana sudah dijelaskan bahwasannya untuk Laporan Realisasi BOP KUA Sungai Pinang yang mencapai target penyerapan anggaran 100% yang artinya seharusnya anggaran tersebut sudah maksimal digunakan dan sudah sesuai antara laporan pertanggungjawaban dengan keadaan dilapangan.

Berdasarkan fakta lapangan yang menunjukan kesenjangan antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta yang ada dilapangan. Di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdapat pembuatan washtafel 1 buah dengan harga 600 ribu rupiah. Namun pada saat penulis melihat situasi lapangan dan kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai pinang, penulis melihat kejanggalan dengan apa yang ada dilaporan pertanggungjawaban atau bisa dikatakan belum sesuai dengan apa yang ada dilapangan.

Gambar 2. Kondisi Tampak Luar Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2021

Gambar 3. Kondisi Ruangan Kantor KUA Kecamatan Sungai Pinang
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan petunjuk teknis, pada saat pelaporan pertanggungjawaban Biaya Operasional Perkantoran di wajibkan untuk masing-masing pengelola BOP KUA harus membuat Buku Kas Umum (BKU) yang tujuannya adalah mencatat biaya masuk dan biaya keluar guna memudahkan untuk melakukan control, analisa, penyesuaian dan juga identifikasi terkait alokasi maupun sumber keuangan dengan buku ini. Namun dalam

faktanya pengelola BOP KUA Kecamatan Sungai Pinang jarang membuat dan mengumpulkan Buku Kas Umum kepada PPK sesuai dengan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.

Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan berdasarkan pra-survei yang sudah dilakukan menunjukan belum optimalnya dalam pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan melihat dari berbagai sudut pandang mengenai pengelolaan BOP di KUA Sungai Pinang. Maka Dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **" Analisis Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah pada bagian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu "Bagaimana Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Bagaimana Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para stakeholder, khususnya dalam hal Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional Perkantoran (BOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pinang, serta diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama baik itu di Sungai Pinang ataupun KUA yang lainnya dalam upaya pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita R. (2011). *Pengelolaan Pendapatana dan Anggaran Daerah*. graha ilmu.

Bastian indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (3rd ed.). erlangga.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. cv. andioffset.

Maryam, N. S. (2016). *JIPSi*. *VI*(1), 1–18.

Rais, M. R. (2018). *ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT*

Rudianto. (2009). *Penganggaran*. erlangga.

Sabeni, A. (2001). *Pokok-pokok Akuntasi Pemerintahan* (4th ed.). BPFE.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Ilmu Pemerintahan*. Prenada Media Group.

Peraturan

Bimbingan Mayarakat Islam Nomor 340 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran RI Tahun 2003.No 17. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran RI Tahun 2005. No 58. Jakarta.

Jurnal

Alfa, A. (2021). *ANALISIS KESELARASAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT (TPB / SDGs) DENGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016-2021*. 23–32.

Amalia, R., & Mus, A. R. (2020). *PARADOKS : JURNAL ILMU EKONOMI Volume 3 . No . 3 (2020); Juli Analisis Anggaran Biaya Operasional sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Pengendalian dan Penilaian Kinerja Keuangan pada PDAM Wai Tipalayo di Kabupaten Polewali Mandar Author Pendahuluan*. *3*(3).

Djamhuri, A. (2013). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Indonesia Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145*. *5*(2), 157–171.

Halik, A. D. (2018). *E-JRA Vol. 07 No. 08 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. *07*(08), 96–108.

Halik, A., Hidayati, N., & Amin, M. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 di SMA Islam Dempo Timur Pasarean Pamekasan. *E-JRA*, *08*(Agustus), 96–108.

Juniar, I. (2018). *Pengelolaan Anggaran Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM tahun2016*. universitas sriwijaya.

Lombok, T. D. I., & Putri, N. A. (2020). *ANALISIS ANGGARAN BIAYA SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN*. *8*(1).

Luan, F. M., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Analisis Anggaran Biaya Operasional Dan Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Return On Asset (ROA) Pada Counter Crocs TM Di Kota Malang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, *6*(2), 158–165. https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1963

Maryam, N. S. (2016). *JIPSi*. *VI*(1), 1–18.

Nanda Tiara Agustini Nyayu, khairani siti, Yunita W, cristina. (2013). *Pengaruh anggaran biaya operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada pt muara dua palembang*. 1–11.

Nirwan hakim, ahmad. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Di Dpd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Provinsi Sumatera Selatan*. universitas sriwijaya.

Rais, M. R. (2018). *ANALISIS ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENGUKUR EFISIENSI BIAYA OPERASIONAL (Studi kasus pada PT . Suryaraya Rubberindo Industries) (Studi kasus pada PT . Suryaraya Rubberindo Industries)*. *November 2015*.

Rizki, M. (2018). Analisis Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt. Tanjung Untung Tanjungpinang. *Cash*, *1*(01), 13–17. https://doi.org/10.52624/cash.v1i01.187

Sorongan, M., Pelleng, F., & Rogahang, J. (2018). Analisis Perbandingan Anggaran Biaya Operasional Dan Anggaran Pendapatan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Air Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *6*(004), 77–85. https://doi.org/10.35797/jab.6.004.2018.21092.77-85

Suak, L. A., Pontoh, W., Pinatik, S., Manajerial, K., Pt, P., Ekapratama, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Peranan Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Manajerial Pada Pt. Dirgaputra Ekapratama. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(2), 369–377. https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33457

Tikollah, M. R., & A. Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan*

Pendidikan, *1*(1), 87. https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5064

Utami, Y. (2018). *Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan Oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detens*. universitas sriwijaya.